



PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

UNTUK PENGAMANAN ASSET PADA PERUSAHAAN
KEBUN SAWIT DI PERUSAHAAN MILIK NEGARA (BUMN),
PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA

A. JUNAEDI KARSO

Tentang Penulis



A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).



Anggota IAKPI
No. 225/UTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE UNTUK PENGAMANAN
ASSET PADA PERUSAHAAN KEBUN
SAWIT DI PERUSAHAAN MILIK NEGARA
(BUMN), PERUSAHAAN SWASTA
DI INDONESIA**

A.Junaedi Karso



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK
PENGAMANAN ASSET PADA PERUSAHAAN KEBUN
SAWIT DI PERUSAHAAN MILIK NEGARA (BUMN),
PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-120-032-7

No. HKI : EC002023139510

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang "**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK PENGAMANAN ASSET PADA PERUSAHAAN KEBUN SAWIT DI PERUSAHAAN MILIK NEGARA (BUMN), PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA**".

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku ini, kami juga sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutip dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desrtasi, tesis, skripsi, website, Internet media online dan media non online, serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. <i>Legal System Theory</i>	27
C. Kerangka Konsep.....	29
BAB 2 PENGATURAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT MILIK NEGARA PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA	34
A. Pengertian, Manfaat, dan Prinsip-prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE	34
B. Dasar Hukum Penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Pada Badan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Milik Negara Berbadan Hukum Perseroan Terbatas maupun swasta.....	56
C. Pengaturan Prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE Pada Perusahaan Kelapa Sawit baik Milik Negara maupun Swasta Dalam Rangka Pengamanan Aset	61
D. Perusahaan Kelapa Sawit Milik Negara, Swasta Di Indonesia	63
E. Kontribusi Sawit Tidak Berbanding Lurus dengan Ekonomi Daerah Di Indonesia	86
BAB 3 PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BIDANG PENGAMANAN TERPADU ASSET UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA.....	90
A. Pengamanan Terpadu Aset Unit Usaha Perusahaan Sawit baik milik Negara maupun milik Swasta.....	91
B. Kasus Konflik Agraria di Sektor Perkebunan di Indonesia	96

C.	Tindak Pidana Pencurian TBS Kelapa Sawit di Perusahaan Sawit baik milik Negara maupun milik swasta	98
D.	Kaitan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP Dengan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit	108
E.	Penggunaan Alat Berteknologi Tinggi dan Aplikasi “Smart Security of Integrity” di Bidang Pengamanan Aset Untuk Meminimalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit Pada Kebun-Kebun milik Perusahaan baik milik negara maupun milik swasta	117
F.	Implementasi <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> Dalam Bidang Pengamanan Aset Untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Perusahaan baik milik Negara maupun milik swasta.....	149
BAB 4	HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PENGAMANAN ASSET PADA PERUSAHAAN KEBUN SAWIT DI PERUSAHAAN MILIK NEGARA, PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA	154
A.	Sejarah Perkembangan Kelapa Sawit Di Indonesia	154
B.	Instrumen Hukum Pidana dan Penggunaannya Dalam Konflik Perkebunan.....	158
C.	Hambatan Penerapan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> di Bidang Pengamanan Aset Untuk Meminimalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Perusahaan Perkebunan Sawit Indonesia Ditinjau dari Sistem Hukum	164
D.	Hambatan Disektor Perusahaan Perkebunan Sawit Indonesia sebagai Penghasil Sawit Terbesar di Dunia.....	169
E.	Masalah Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia....	180

F. Upaya Perusahaan Perkebunan Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> Ditinjau dari Sistem Hukum Indonesia	186
DAFTAR PUSTAKA.....	188
TENTANG PENULIS.....	203

BAB

1 | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sub sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran strategis sub sektor perkebunan dalam meningkatkan perekonomian nasional ini digambarkan melalui kontribusinya dalam berbagai hal salah satunya sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada Tahun 2018, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB. Selain sebagai penyumbang PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang tinggi; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; serta penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan¹.

Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati (*biodiesel*). Kelapa sawit memberikan pengaruh

¹ Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2018-2020

BAB 2

PENGATURAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT MILIK NEGARA PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA

Pada bab ini akan mengkaji dan menganalisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) pada PT. Perkebunan Nusantara IV dalam rangka pengamanan aset. Sebelum membahas mengenai pokok kajian tersebut, maka perlu untuk mengetahui mengenai pengertian, manfaat, dan prinsip-prinsip GCG, serta dasar hukum penerapannya.

A. Pengertian, Manfaat, dan Prinsip-prinsip *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Di negara-negara maju dengan ekonomi yang relatif makmur, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (selanjutnya disebut GCG) sudah lama menjadi isu. Masalah ini semakin banyak menarik perhatian masyarakat dunia sesudah terjadi krisis besar. Seperti krisis besar di Amerika Serikat tahun 1929 dan krisis perbankan di Inggris tahun 1970.⁵⁶ Di Indonesia masalah ini muncul sejak krisis besar yang dimulai pada triwulan ketiga tahun 1997. Secara umum, para praktisi dan akademisi sepakat bahwa salah satu penyebab dari krisis besar tersebut adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman

⁵⁶ A. Davies, *A Strategic Approach to Corporate Governance*, England: Gower Publishing Limited, (1999), hlm. 34-35. Lihat juga: Bone, Fandi La Ode., dan Sahrul Ponto, "Pengaruh Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance", *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 4, No. 2, (2017): 178302, hlm. 235.

BAB

3

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM BIDANG PENGAMANAN TERPADU ASSET UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*), di Perusahaan milik negara (BUMN) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.¹³¹ Proses dan mekanisme atau tata kelola yang dimaksud adalah bagaimana sebuah perusahaan dipimpin, diarahkan dan dikendalikan (lead, direct, dan control) dan perlu dijabarkan dalam suatu bentuk pedoman yang disebut Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance atau Code of CG).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini sebagai pedoman umum dalam pengelolaan perusahaan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman yang lebih rinci oleh masing-masing organ perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman tersebut merupakan penyempurnaan (revisi) dari pedoman yang telah disusun pada tahun 2013. Materi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut bersumber dari: Anggaran Dasar Perusahaan; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tertanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) Pada Badan Usaha Milik Negara

¹³¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB

4

HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PENGAMANAN ASSET PADA PERUSAHAAN KEBUN SAWIT DI PERUSAHAAN MILIK NEGARA, PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Kelapa Sawit Di Indonesia

Sebelum membahas Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pengamanan Asset Pada Perusahaan Kebun Sawit Di Perusahaan Milik Negara (Bumn), Perusahaan Swasta Di Indonesia, perkenankanlah penulis terlebih dahulu membahas tentang Sejarah Perkembangan Kelapa Sawit Di Indonesia, telah dimaklumi bersama bahwasanya banyaknya tanaman lain yang kelak tumbuh dan berkembang di Indonesia, kelapa sawit ternyata juga tidak serta merta merupakan tanaman yang lahir dari bumi pertiwi. Menilik dari sejarah perkembangannya, tanaman minyak nabati ini ternyata memiliki sejarah panjang sebelum masuk ke negeri kita tercinta¹⁹⁸.

Afrika Barat adalah sebuah negara di mana kelapa sawit berasal. Nama latinnya adalah *Elaeis guineensis* yang dari awal mula ditemukan ternyata sudah diketahui mengandung kandungan minyak nabati nan kaya melebihi tanaman lainnya. Masuknya tanaman ini pertama kali dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1848. Awal mulanya hanya dibawa empat batang bibit kelapa sawit dan kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman bibit yang dibawa berasal dari Mauritius

¹⁹⁸ <https://pkt-group.com/sawitnotif/sejarah-perkembangan-kelapa-sawit-di-indonesia/#>, diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 21.17 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin., 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agoes, Sukrisno., 2011, Etika Bisnis dan Profesi, Jakarta: Salemba Empat.
- Anonim, tanpa tahun, Seri Monograf 3, UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific.
- Bakkannavar, Shankar M., 2018, Forensic Medicine and Toxicology: Practical Manual, New Delhi: Elsevier, RELX India Pvt.Ltd.
- Bartens, K., 2002, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius.
- Bungin, Burhan., 2009, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami., 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media.
- Clarkson, Max B.E., (ed), 1998 The Corporation and Its Stakeholders: Classic and Contemporrary Readings, Toronto: University of Toronto Press.
- Crowe, Timothy D., 2000, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, 2nd Edition, Boston, USA: Butterworth-Heinemann.
- Crowter, Jonatahan (ed), 1995, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Oxford Advanced Learners Dictionary, New York: Oxford University Press.
- Darmawaty, Deni., Khomsiyah, dan Rika Gelar Rahayu, 2004, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, Bali, Denpasar: SNA VII.

- Darmawi, Asmaji., 2016, Antologi Administrasi Publik & Pembangunan: Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin, Cet. Ke-1, Malang: UB Press.
- Davies, A., 1999, A Strategic Approach to Corporate Governance, England: Gower Publishing Limited.
- Djakti, Dorodjatun Kuncoro., 2004, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di Indonesia: Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan, Jakarta: Indeks.
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Echdar, Saban., dan Maryadi, 2019, Business Ethic and Entrepreneurship (Etika Bisnis & Kewirausahaan), Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Andrew L., dan Samantha Miles, 2006, Stakeholders Theory and Practice, UK : Oxford University Press.
- Friedman, Lawrence M., 2013, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung : Nusa Media.
- Judith, Hennigfeld., 2006, The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons.
- Khairandy, Ridwan., dan Camelia Malik, 2007, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Khairandy, Ridwan., 2009, Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusumastuti, A. Dwi., 2013, Pengaruh *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada

Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011, Surakarta: Universitas Surakarta.

Lipton, Philip., dan Abraham Herzberg, 1992, Understanding Company Law, Brisbane: The Law Book Company Ltd.

Lubis, M. Solly., 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju.

Mahmoudi, Reza., dan Krzystof Iniewski (ed), 2013, Low Power Emerging Wireless Technologies, New York: CRC Press.

Marzuki, Peter Mahmud., 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

Moeljono, Djokosantoso., 2005, Good Corporate Culture Sebagai Inti *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* , Jakarta : Elex Media Komputindo.

Moffitt, Michael L., and Robert C. Bordone, (eds.), 2005, Handbook of Dispute Resolution Program on Negotiation/Jossey-Bass.

Muttaqien, Andi., dkk., 2012, Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-Pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi, Cet. Ke-1, Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet.

Pamukcu, Sibel., dan Cheng, Liang., (eds.), 2018, Underground Sensing: Monitoring and Hazard Detection for Environment and Infrastructure, London Wall, UK: Elsevier.

Pelzer, Karl J., 1991, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Pustaka Sinar Harapan.

Prasetyo, Teguh., dkk., 2013, Hukum dan Undang-Undang Perkebunan, Bandung: Nusamedia.

Prodjodikoro, Wirjono., 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco.

- Reksodiputro, Mardjono., 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Santoso, Topo., dan Eva Achjani Zulfa, 2013, Kriminologi, Cet. Ke-13, Jakarta: Rajawali Press.
- Sikumbang, Jusmadi., 2010, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Medan : Pustaka Press.
- Smerden, Richard., 2010, A Practical Guide to Corporation Governance, 4th Ed., London: Thomson Reuters (Legal) Limited.
- Snoeyenbos, Milton., Robert Almeder, James Humber, 2001, Business Ethics, 3th Ed., New York: Prometheus Books.
- Soekanto, Soerjono., 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, Totok., 2017, Pengantar Kriminologi, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Suprayitno, G., dkk., 2005, "Internalisasi GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dalam Proses Bisnis: Laporan Corporate Governance Perception Index 2004", Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Sutedi, Adrian., 2011, GOOD CORPORATE GOVERNANCE , Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyono, Sri., 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Rancangan Merger Diantara BUMN), Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tjager, I Nyoman., 2003, Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta: Prenhallindo.
- Tjokroamidjoyo, Bintaro., dan Mustofa Adijoyo, 1998, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: Hadi Masagung.

Tunggal, A. Wijaya., 2013, Internal Audit dan GOOD CORPORATE GOVERNANCE , Jakarta: Erlangga.

Wagiran, 2019, Metodologi Penelitian Pendidikan : Teori dan Implementasi, Sleman : Deepublish.

Wuisman, JJ. M., 1996, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Zakhem, Abe J., Daniel E. Palmer, and Mary Lyn Stoll, 2008, Stakeholder Theory: Essential Readings in Ethical Leadership and Management, Amherst, NY : Prometheus Books.

Zed, Mestika., 2008, Metode Penelitian Kepustakaan, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Junaedi, A, 2020, Penerapan GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan, DI Yogyakarta: Samudera Biru

B. Karya Ilmiah

Agustine, Oly Viana., (2018), "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Pada Pemuliaan Tanaman dan Alat Berat (The Decision of the Constitutional Court on the National Economy Development on the Plant Breeding and Heavy Equipment)", Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 7, No. 1.

Alhamra, Insan Thariq., dan Hermiyetti, 2016, "Analisis Pengaruh GOOD CORPORATE GOVERNANCE dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Top 50 Emiten Dengan Skor CG Tertinggi Hasil IICD Melalui Pendekatan ASEAN Corporate Governance Scorecard Periode 2012-2013), Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC,

Universitas Bakrie, Jakarta, dilaksanakan tanggal 2-3 Mei 2016.

Anonim, 2012, "Karang Mendapo Melawan Ketidakadilan", Elsam-Pilnet-Sawit Watch.

Araujo, Elidio Dee., 2013, "Pengaruh Kepemimpinan Stratejik dan Corporate Culture Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Sebagai Variabel Intervening (Suatu Studi Persepsi Manajer Pada Perusahaan Anggota Camara Comercia Indusria Timor Leste (CCI-TL)", Ph.D diss., Widya Mandala Catholic Universitas Surabaya, Surabaya.

Arbaina, Endang Siti., (2012), "Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pada Perbankan di Indonesia", Jurnal Akuntansi AKUNESA 1, No. 1.

Bone, Fandi La Ode., dan Sahrul Ponto, (2017), "Pengaruh Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance", Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi 4, No. 2.

Donaldson, Thomas., dan Lee E.Preston, (1995), "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, Implications", Academy of Management Review.

Iswandi dan Widya Rahmawati, (2011), "Evaluasi Pelaksanaan dan Penerapan Prinsip Dalam Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) Pada PT. Aneka Tambang, Tbk", Binus Business Review Vol. 2 No. 1.

Kelvianto, Iestyn., dan Ronny H. Mustamu, (2018), "Implementasi Prinsip-Prinsip *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu", Agora Vol. 6 No. 2.

Lestari, Tri Rini Puji., (2016), "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia", Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 2.

Madari, Muhammad Soma Karya., tanpa tahun, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP", Fakultas Hukum UIKA Bogor.

Maulida, Rizka., dkk., (2015), "Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Merpati, Vega O., (2014), "Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu", Lex et Societatis Vol. II No. 8, Sep-Nov.

Miraza, Bactiar Hassan., 2000, "GOOD CORPORATE GOVERNANCE " Makalah disampaikan pada lokakarya Good Corpore Governance, kerjasama Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas of South Carolina, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, Medan.

Pandiangan, Sichmen., tanpa tahun, "Bentuk-bentuk Perlawanan Petani terhadap Negara", Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Volume 5 No. 3.

PT. Perkebunan Nusantara IV, 2018, "Laporan Tahunan 2017" , PT. Perkebunan Nusantara IV, Medan.

Raharjo, Teguh Budi., (2010), "GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) dan Pemahamannya di Dunia Bisnis", Permana 2, No. 1.

- Riantono, I.E., (2014), "Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* : Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan", Binus Business Review Vol. 5 No. 1.
- Rohaeni, Eni Siti., dkk., (2013), "Uji Coba Penggunaan Microchip Sebagai Sistem Deteksi/Monitor Sapi Kembar di Kalimantan Selatan", Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian.
- Supatmi, (2007), "Corporate Governance dan Kinerja Keuangan", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 14.
- Syahidulhaq, Hafiidh As, Hafiddudin Hafiddudin, and Suci Aulia, (2016). "Sistem Keamanan Berbasis Alarm Ip Camera dengan Passive Infrared Receiver (Pir) Sensor dan SMS Gateway." Jurnal Elektro dan Telekomunikasi Terapan 3, No. 2.
- Theberge, Leonard J., tanpa tahun, "Law and Economic Development", Journal of International Law and Policy, (Vol.9:231).
- Toha, Suherman., dkk., 2015, "Laporan Akhir: Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pada Dunia Usaha", Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Warman, Edi., (2014), "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus-Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perspektif Kriminologi", Jurnal Mahupiki Vol. 2 No. 1.
- Wibowo, Edi., (2010), "Implementasi *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2.

Yudanto, Noor., dan M. Setyawan Santoso, (September 1998),
"Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil", Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan.

C. Media Massa dan Internet

Anonim, "Risk Calculation Worksheet – Calculating Risk Using GAR Model (Green-Ambre-Red)",
<https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/National%20Strike%20Force/foscr/ASTFOSCRSeminar/Presentations/Safety/ORM-GAR.pdf?ver=2017-09-14-144539-427.>, diakses pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020.

Berita RRI Online, "PTPN IV Rugi Hingga Rp. 15 Milyar Akibat Pencurian TBS",
http://rri.co.id/post/berita/498585/daerah/akibat_pencurian_tbs_ptpn_iv_rugi_hingga_rp15_milyar.html., diakses pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020.

Friedman, Milton., "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", The New York Times Magazine, tanggal 13 September 1970.

Harian Republika, "Pemerintah Perlu Beri Insentif Untuk Produksi Minyak Curah", diterbitkan Senin, 07 Oktober 2019.

Indonesia.co.id, "Membangun Industri Sawit Berkelaanjutan",
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/membangun-industri-sawit-berkelanjutan.>, diakses Senin, 18 Mei 2020.

Indosecurity.net, "Pepper Spray", <http://indosecurity.net/jual-pepper-spray-semprotan-merica-gas-air-mata-semprotan-cabai.>, diakses pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020.

IndoSecuritySystem, "Salto Luncurkan Gembok Elektronik XS4 GEO",
https://www.indosecuritysystem.com/read/access_con

trol/2017/04/12/1726/salto-luncurkan-gembok-elektronik-xs4-geo., diakses pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020.

Website Resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), "Memecah Rekor: Ekspor Minyak Sawit 2017 Tembus USD. 22,9 Miliar", <https://gapki.id/news/4129/memecah-rekor-ekspor-minyak-sawit-2017-tembus-us-229-miliar.>, diakses Senin, 18 Mei 2020.

Website Resmi KBBI Online, "Eskalasi", <https://kbbi.web.id/escalasi.>, diakses Jumat, 17 Juli 2020.

Website Resmi KBBI Online, "Pengamanan", <https://kbbi.web.id/aman.>, diakses pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019.

Website Resmi Okezone.com., "Bappenas: BUMN Harus Dikelola Dengan Prinsip Korporasi", <https://economy.okezone.com/read/2016/04/14/320/1362771/bappenas-bumn-harus-dikelola-dengan-prinsip-korporasi.>, diakses pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika>, Sektor Pertanian Sumbang 12,4% PDB , diakses pada tanggal 6. Desember 2023, pukul 11.08 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/monavia-ayu-rizaty>, Luas Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Nasional Capai 15,08 Juta Ha pada 2021, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.51 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/adi-ahdiat>, Ini Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar pada 2022, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.55 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika>, India dan Tiongkok, Negara dengan Nilai Ekspor Minyak Sawit

Indonesia Tertinggi 2022, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 10.49 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, 10 Negara dengan Konsumsi Minyak Sawit Terbesar Dunia, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 13.01 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhamad>, 10 Negara Konsumen Minyak Sawit Terbesar di Dunia 2022/2023, Indonesia Teratas, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 09.09 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, Area Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit Indonesia Terluas di Dunia, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.39 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, Luas Perkebunan Sawit Rakyat 40,6% dari Total Perkebunan Sawit Indonesia, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.29 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, Produktivitas Sawit di 10 Provinsi dengan Lahan Sawit Terluas, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.33 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, Perkebunan Sawit Mampu Menyerap 4,42 Juta Tenaga Kerja, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.47 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/annissa-mutia>, Produksi Minyak Sawit RI Capai 45,12 Juta Ton pada 2022, Ini Provinsi dengan Produksi Terbesar, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.34 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/vika-azkiya-dihni>, Produksi Minyak Sawit (Maret 2021-Maret 2022), diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.39 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, Persaingan Indonesia Vs Malaysia dalam Ekspor CPO ke India, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.57 WIB

<https://pkt-group.com/sawitnotif/> Masalah Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 13.12 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>, Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia Melonjak pada 2022, Tertinggi Sedekade, diakses Pada tanggal Desember 2023, pukul 09.06 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/reza-pahlevi>, Produktivitas Perkebunan Sawit Indonesia Menyamai Malaysia pada 2021,diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.44 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/alfons-yoshio>, Kontribusi Sawit Tidak Berbanding Lurus dengan Ekonomi Daerah Persentase PDRB Perkebunan terhadap Total PDRB (%),diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.09 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/alfons-yoshio>, Pertumbuhan Ekonomi Sentra Sawit Meningkat, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.11 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/adi-ahdiat>, Volume Produksi, Ekspor, dan Konsumsi Dalam Negeri Minyak Sawit Indonesia (2018-2022), diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.37 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/nabilah-muhammad>, Ada 212 Konflik Agraria pada 2022, Terbanyak di Sektor Perkebunan, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.14 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar>,
Inilah Deforestasi di Indonesia Periode 1990-2017, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.16 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi_2001-2018, Indonesia kehilangan 26 juta ha Lahan Tutupan Pohon, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.19 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata>, Kabupaten dengan Tutupan Hutan Terluas dalam Konsesi (Ha), diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.23 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata_tumpang_tindih, Tumpang Tindih Lahan Sawit di Kawasan Hutan Sebesar 3,4 Juta Hektar, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 13.06 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/viva-budy-kusnandar>, Produsen CPO Terbesar Dunia, RI-Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.31 WIB

https://databoks.katadata.co.id/profile/tim-publikasi-katadata_minyak_sawit, Berapa Konsumsi Minyak Sawit untuk Industri, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 12.59 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika>, Indonesia Paling Rentan Kebakaran Lahan Sawit, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 10.38 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/profile/erlina-f-santika>, Indonesia Paling Rentan Kebakaran Lahan Sawit, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 09.56 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/M-MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GOOD CORPORATE GOVERNANCE pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG.

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV No. DK-03/KPTS/IV/2019 dan No. 04.01/KPTS/07/IV/2019 tentang Pememberlakuan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV No. DK/18/KPTS/2016 dan No. 04.03/02/KPTS/2016 tentang Pemberlakuan Infrastruktur GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. Perkebunan Nusantara IV.

Prosedur Tetap PTPN IV No. 04.13/Protap/01/X/2018 tentang Pengamanan Terpadu Aset Unit Usaha PT. Perkebunan Nusantara IV.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 48/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 62/PUU-XI/2013 tertanggal 03 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 138/PUU-XIII/2015.

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science

Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanities Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of *Salus Populi Suprema Lex*, (Artech Journsl of Art and Sociel Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing

Service through Digital Technology-based Losening Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020).

Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa>, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah ditulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya ongy Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian

dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Sepertu Linatas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntung Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi Di Indonesia; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; dan Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di

PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010. Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "How to Perform While Transform" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaan Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

- Nomor dan tanggal permohonan : ECO02023139510, 27 Desember 2023
- Pencipta**
- Nama : A. Junadi Karso
- Alamat : Jl. Kebon Randu I RT.005/R.W.001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, 45256
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pemegang Hak Cipta**
- Nama : A. Junadi Karso
- Alamat : Jl. Kebon Randu I RT.005/R.W.001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat 45256
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jenis Ciptaan : Buku
- Judul Ciptaan : **Penerapan Good Corporate Governance Untuk Pengamanan Asset Pada Perusahaan Kebun Sawit Di Perusahaan Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta Di Indonesia**
- Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Desember 2023, di Purbaingga
- Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- Nomor pencatatan : 000572463

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.